

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NGADA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK**

(Studi kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada, NTT)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana**

Disusun oleh :

YOSEPH M.V. D. KABUL

NIM : 18031000141



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG**

2022

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

1. Judul : Implementasi Perda Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
(Studi Kasus Di Dinas Kominfo Kabupaten Ngada, NTT)
2. Disusun Oleh : Yoseph Maximilianus Vilcanova Danda Kabul
3. NIM : 18031000141
4. Program Studi : Administasi Publik
5. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Universitas : Merdeka Malang

Malang,

Pembimbing I



Dr. H. Sukardi, M.Si

Pembimbing II



Chandra Dinata, S. Sos., MPA

Menyetujui,

Dekan Fisp Unmer Malang



Dr. H. Sukardi, M. Si

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi oleh Yoseph M. V. D. Kabul ini telah Dipresentasikan Di Hadapan Tim Penguji

Hari : Selasa

Tanggal : 2 Agustus 2022

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

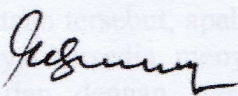
Susunan Tim Penguji

Ketua



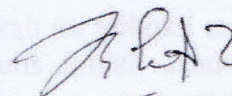
Dr. Sukardi, M. Si

Sekretaris



Drs. H. Titot Edy
Suroso, MS

Anggota



Dr. Hj. Sri Hartini
Djatmikowati, M.Si

Mengesahkan

Dekan Fisip Unmer
Malang



Dr. Sukardi, M. Si.

PERNYATAAN ORISINALITAS NASKAH SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Yoseph M. V. D. Kabul
Nim : 18031000141
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Merdeka Malang

Menyatakan sebenar-benarnya, bahwa sepanjang pengetahuan mengenai skripsi yang telah saya susun sekarang ini :

1. Masih belum pernah diajukan oleh orang lain dalam rangka memperoleh gelar akademik Sarjana Strata 1
2. Tidak memiliki kesamaan dengan karya-karya tulis ilmiah yang sudah ditulis dan diterbitkan orang lain.
3. Setiap kutipan yang bersumber dari karya orang lain pada naskah ini, selalu disebutkan sumber referensinya dan tertulis secara resmi di dalam daftar pustaka.

Atas dasar pernyataan tersebut, apabila didalam naskah ini terbukti unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia menyatakan karya tulis ilmiah akademik skripsi ini digugurkan dan dengan segala konsekuensi yang menyertainya termasuk pembatalan gelar akademik yang diperoleh, bahkan bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas pasal : 25 ayat 2 dan pasal 70) serta **Panduan Pencegahan Plagiasi** yang telah ditetapkan oleh keputusan Dekan FISIP Unmer Malang No, kep.12.a/fisip/um/vii/2016 tanggal 7 juli 2016.

Malang, Mei 2022

Yang menyatakan



Yoseph M. V. D.
Kabul

MOTTO

**“ JIKA KAMU TAK DAPAT MELAKUKAN HAL
YANG BESAR, LAKUKANLAH HAL KECIL
DENGAN CARA YANG HEBAT ”**

Kupersembahkan Kepada :

Bapa, Mama, Saudara, Sahabat dan Almamater

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yang Maha Kuasa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi di Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur).

Suatu penghargaan bagi penulis karena penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan skripsi tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan limpah terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Anwar Sanusi, SE, M. Si selaku rektor Universitas Merdeka Malang.
2. Bapak Dr. Sukardi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Soisal dan Ilmu Politik sekaligus sebagai dosen pembimbing I.
3. Ibu Dra. Hj. Umi Chayatin, M. Si selaku ketua jurusan S1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Plitik Universitas Merdeka Malang.
4. Bapak Chandra Dinata, S.Sos, MPA selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
5. Bapak /Ibu asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Merdeka Malang.

6. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan lewat doa dan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Kakak dan adik yang memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan dan crew Timor jaya yang sudah saling mendukung dalam menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Malang, Juli 2022



Yoseph M. V. D. Kabul

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KERANGKA DASAR TEORI.....	7
2.1 Gambaran Praktik KIP.....	7
2.2 Keterbukaan Informasi	12
2.3 Informasi Publik	18
2.4 Teori Kebijakan Publik.....	20
2.5 Implementasi Kebijakan Publik.....	21
2.5.1 Implementasi.....	21
2.5.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	23
2.5.3 Konsep Implementasi Yang Digunakan	25
2.6 Perda Kabupaten Ngada Nomor tahun 2019	30

2.7 Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Fokus Penelitian	33
3.3 Informan Penelitian	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	36
3.5 Teknik Analisis Data	39
3.6 Lokasi Penelitian	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	42
4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Kominfo	42
4.1.2 Visi Dan Misi Dinas.....	42
4.1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas.....	43
4.1.4 Struktur Organisasi Dinas	44
4.1.5 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	48
4.2 Penyajian Data.....	49
4.3 Pembahasan	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Fokus Penelitian	34
Tabel 3.2 Informan Penelitian	35
Tabel 4.1 Sumber Daya Perangkat Daerah	49
Tabel 4.2 Jumlah Kantor Pos di Kabupaten Ngada.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir.....	31
Gambar 3.1 Model Analisis Data.....	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas	45
Gambar 4.2 Chanel Youtube Dinas Kominfo	52
Gambar 4.3 Aplikasi RSPD Kabupaten Ngada.....	53
Gambar 4.4 Baliho Program Dinas Kominfo.....	54
Gambar 4.5 Sosialisasi dan Pemungutan Retribusi di Pasar Bobou	60
Gambar 4.6 Buku SOP Dinas Kominfo	61
Gambar 4.7 Rapat Bersama Petugas PPID	63
Gaambar 4.8 Kepala Dinas Di Lapangan.....	64

ABSTRAK

Yoseph M. V. D. Kabul, NIM. 18031000141 dibimbing oleh Dosen Pembimbing I yakni Bapak H. Sukardi dan Dosen II Bapak Chandra Dinata. Menyelesaikan skripsi dengan judul “**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik**(Studi Kasus di Dinas Kominfo Kabupaten Ngada)”.

Keterbukaan informasi publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan harus diterapkan disemua badan publik. Informasi yang benar, efektif dan efisien sangat membantu masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam mengurangi ketidakpastian serta mengantisipasi kendala yang akan diperkirakan terjadi. Informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Ngada adalah tentang kinerja badan publik terutama tentang laporan keuangan dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh dinas Kominfo Kabupaten Ngada serta mengetahui faktor pendukung serta yang menjadi penghambat dalam merealisasikan peraturan daerah tersebut.

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif. Data penelitian diperoleh dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dibagi dalam tiga kelompok, yaitu informan kunci, informan utama dan informan tambahan. Penentuan informan utama dilakukan secara purposive yaitu penentuan informan secara sengaja.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa dari segi komunikasi, keterbukaan informasi pada dinas Kominfo masih belum memadai. Informasi yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat masih terbatas pada informasi yang kurang penting, dan cara penyampaiannya pun tidak secara langsung kepada masyarakat. Dari segi sumber daya, informasi data yang diberikan sudah sesuai dengan kepentingan publik, dan dampaknya secara fisik telah diterima masyarakat. Namun sering terjadi penyelewengan dana sehingga sangat merugikan kepentingan umum. Dari segi struktur birokrasi, dinas telah melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan pemberian informasi pelaksanaan pemerintahan telah dilakukan dengan baik. Pimpinan yang terkait dengan fungsi pengawasan telah memantau secara langsung ke lapangan untuk mengetahui bahwa masyarakat sudah memperoleh informasi secara memadai. Dari segi disposisi, Dinas Kominfo secara serius menanggapi keluhan yang timbul dari masyarakat khususnya data-data yang kurang. Namun keterbatasan sumber daya dana sering menjadi kendala sehingga tanggapan terhadap keluhan masyarakat dengan realisasi perbaikan menjadi terlambat.

Kata kunci: Implementasi, Keterbukaan Informasi Publik

ABSTRACT

Yoseph M. V. D. Kabul, NIM. 18031000141 was supervised by Advisor I, namely Mr. H. Sukardi and Lecturer II, Mr. Chandra Dinata. Completed a thesis entitled "**Implementation of Ngada Regency Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Public Information Disclosure** (Case Study at the Ngada Regency Kominfo Service)".

Disclosure of public information is the responsibility of the government and must be implemented in all public bodies. Correct, effective and efficient information is very helpful for the community in making decisions in reducing uncertainty and anticipating obstacles that will be expected to occur. Information that is really needed by the people of Ngada Regency is about the performance of public bodies, especially regarding financial reports and other information regulated in laws and regulations.

The purpose of this study was to find out how the implementation of the Ngada Regency Regional Regulation regarding public information disclosure carried out by the Ngada Regency Communications and Information Office and to find out the supporting and inhibiting factors in realizing the regional regulation.

In this study the method used is qualitative. Research data obtained from observations, interviews and documentation studies. Informants in this study were divided into three groups, namely key informants, main informants and additional informants. The determination of the main informants was carried out purposively, namely the determination of the informants intentionally.

Based on the results of research conducted in the field, it shows that in terms of communication, information disclosure at the Kominfo service is still inadequate. Information that is conveyed openly to the public is still limited to information that is less important, and the method of delivery is not directly to the public. In terms of resources, the data information provided is in accordance with the public interest, and the physical impact has been received by the community. However, misappropriation of funds often occurs so that it is very detrimental to the public interest. In terms of the bureaucratic structure, the service has carried out its supervisory function on the implementation of providing information on government implementation. The leadership related to the supervisory function has monitored directly in the field to find out that the public has obtained adequate information. In terms of disposition, the Department of Communication and Informatics seriously responds to complaints from the public, especially the lack of data. However, limited funding resources are often an obstacle so that the response to public complaints with the realization of improvements is delayed.

Keywords: Implementation, Public Information Disclosure